

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Nurnadin haisya tilah¹, Usnul aulia², Urwatul wusqo lanfisomalaha³

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, nadinbima9@gmail.com¹

²Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, husnulaulia05@gmail.com²

³Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, urwatulwutsqo3330@gmail.com³

Abstrak: Pemahaman mahasiswa terhadap hak dan kewajiban warga negara adalah sejauh mana mahasiswa menyadari, mengetahui, dan menginternalisasi prinsip-prinsip hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai bagian dari masyarakat dan negara. Ini bukan hanya soal tahu secara teori, tetapi juga bagaimana mereka bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahaman tersebut. Orientasi yang baik terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara penting bagi semuanya pada pendidikan kewarganegaraan, pada mahasiswa terlebih lagi, sebagai generasi muda dan agen perubahan. Mahasiswa yang benar-benar memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dapat mengharapkan aktivitas, kebiasaan berpikir kritis, dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh pemahaman mahasiswa terhadap hak dan kewajiban warga negara. Manfaat penelitian adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap hak dan kewajiban warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman mahasiswa terhadap hak dan kewajiban warga negara yaitu meningkatkan partisipasi aktif pada demokrasi, meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan, pembentukan karakter bangsa yang bertanggung jawab, mendorong perubahan sosial dan reformasi, meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan, mendorong inklusivitas dan toleransi.

Kata Kunci: Pengaruh, Mahasiswa, Hak, Kewajiban, Warga negara

*Correspondence Address: nadinbima9@gmail.com

Article History	Received	Revised	Published
	2 June 2025	-	30 March 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai warga negara oleh mahasiswa memainkan peranan penting dalam pembentukan karakter dan kesadaran berbangsa yang kuat. Sebagai generasi yang akan datang, mahasiswa harus mampu memiliki kecerdasan intelektual maupun kecerdasan peran serta dan tanggung jawabnya dalam sistem kehidupan bernegara. Tingginya tingkat pengetahuan terhadap hak dan kewajiban dapat meningkatkan partisipasi di semua bidang: sosial, politik, dan hukum. Oleh karena itu, masyarakat hukum adil dan masyarakat demokratis pun akan bisa menjadi tak ternilai harganya.

Pemahaman akan hak dan kewajiban warga negara adalah landasan yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat demokratis yang adil. Mahasiswa, sebagai representasi intelektual muda bangsa, bahwa mereka juga bertanggung jawab tidak hanya untuk menginternalisasikan nilai-nilai konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat tetapi juga untuk menyebarkannya.

Berkat ketiadaan sufisien dari pengetahuan dan perhatian, mahasiswa tidak akan memenuhi peran mereka secara optimal dalam kehidupan negara. Seperti yang dinyatakan oleh Kaelan (2013), kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara menjadi indikator penting bagi kualitas partisipasi dalam kehidupan bernegara.

Lebih jauh lagi, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ini menumbuhkan sikap kritis, demokratis, dan bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban pewarga negara bagi para mahasiswa. Pendidikan ini harus juga bersifat berbasis praktik, harus diinformasikan dan diarahkan oleh kehidupan di kampus dan masyarakat politik secara keseluruhan. Menurut Winataputra (2001), pendidikan kewarganegaraan seharusnya mampu menumbuhkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*), yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berperan aktif dalam kehidupan bernegara.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum semua mahasiswa memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kondisi ini secara umum disebabkan oleh beberapa hal, seperti rendahnya minat terhadap isu-isu kebangsaan, kurangnya metode pembelajaran yang interaktif, serta minimnya ruang partisipasi yang diberikan dosen kepada mahasiswa. Menurut penelitian oleh Sudrajat (2015), lemahnya pemahaman mahasiswa terhadap konstitusi dan kewarganegaraan berdampak pada rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosial-politik di lingkungan kampus maupun masyarakat luas.

METODE | METHOD

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pencarian pustaka. Studi Literatur adalah metode yang menganalisis literatur, majalah, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan ditangani. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya siswa memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Menurut M. Nazir (2016) dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian* mengemukakan bahwa studi kepustakaan atau studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Sehingga metode ini dapat membantu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik untuk penelitian yang akan dirumuskan dengan memberikan acuan kepada pembuat dalam mengartikan data yang akan di kumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Hak berarti berkuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harus kita terima atau dianggap sebagai hal yang selalu kita lakukan, dan orang lain tidak boleh merampasnya dari kita, baik secara paksa maupun tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan hak lainnya. Menurut pandangan Notonegoro tentang hak adalah “oleh pihak tertentu. Hak untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harus diterima atau dilaksanakan dan pada prinsipnya tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang mungkin terpaksa melakukannya.”

Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Tergantung situasinya. Sebagai warga negara kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Dapat di ketahui bahwa hak dan kewajiban ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, namun dalam pemenuhannya harus seimbang. Kalau tidak seimbang bisa terjadi pertentangan dan bisa saja menempuh jalur hukum.

Hak dan Kewajiban asasi manusia dalam pancasila bahwa Ngurisan memuat dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu antara hak dan kewajiban merupakan suatu yang timbul dari adanya sebab akibat. Hak dan kewajiban tersebut direalisasikan dalam nilai dasar pacasila yang bersifat

universal. Artinya hak tersebut berlaku sejak ia lahir sehingga didalamnya terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Dimana tradisi ngurisan dapat diartikan dengan diberikan hak untuk hidup yang berarti bahwa seseorang berhak bebas dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan dirinya (Almakki, 2023).

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sebagian besar masyarakatnya tak tertandingi, pemahaman mahasiswa atas hak dan kewajiban warga negara adalah kebutuhan mendasar. Mahasiswa adalah bagian dari generasi muda terdidik yang menentukan masa depan bangsa. Berikut pengaruh pemahaman mahasiswa terhadap hak dan kewajiban warga negara.

1. Meningkatkan Partisipasi Aktif Pada Demokrasi

Mahasiswa yang tahu hak dan kewajibannya cenderung lebih aktif pada aktivitas politik misalnya pemilu, diskusi publik, dan aksi demonstrasi yg damai. Mereka sebagai masyarakat negara yg kritis terhadap kebijakan pemerintah dan aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, mereka bisa memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab dan transparan pada menjalankan tugasnya. Dengan partisipasi aktif pada demokrasi, mahasiswa bisa memperjuangkan hak-hak warga yang terabaikan dan memperjuangkan keadilan sosial. Mereka bisa sebagai bunyi bagi warga yang mempunyai akses ke kekuasaan, dan memperjuangkan kebijakan yang lebih baik buat warga .

Partisipasi aktif mahasiswa pada demokrasi juga bisa menaikkan pencerahan warga mengenai pentingnya hak dan kewajiban masyarakat negara. Dengan demikian, warga bisa sebagai lebih aktif pada memperjuangkan hak-hak mereka dan memperjuangkan keadilan sosial. Mahasiswa bisa sebagai model bagi warga lainnya, memperjuangkan kebijakan yang lebih baik buat warga Dengan tahu hak dan kewajiban mereka, mahasiswa bisa memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak warga yang terabaikan. Dengan partisipasi aktif pada demokrasi, mahasiswa bisa membantu membentuk warga yang lebih adil dan setara. Mereka bisa memperjuangkan hak-hak warga yang terabaikan, dan memperjuangkan kebijakan yang lebih baik buat warga . Partisipasi aktif mahasiswa pada demokrasi juga bisa membantu menaikkan kualitas pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah bisa lebih responsif terhadap kebutuhan warga dan lebih transparan pada menjalankan tugasnya.

Mahasiswa bisa sebagai pengawas pemerintah yang efektif, dan memperjuangkan kebijakan yang lebih baik buat warga . Dengan tahu hak dan kewajiban mereka, mahasiswa bisa memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak warga yang terabaikan. Dengan demikian, partisipasi aktif mahasiswa pada demokrasi sangat krusial pada membentuk warga yang lebih adil dan setara. Mahasiswa bisa sebagai agen perubahan yang positif, dan memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak warga yang terabaikan.

2. Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Terhadap Peraturan

Kesadaran mahasiswa mengenai tanggung jawab seperti membayar pajak atau menaati hukum membuat mereka lebih peka terhadap pentingnya ketertiban dan keadilan sosial. Ini berkontribusi pada pembentukan kondisi sosial yang lebih teratur dan terstruktur. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, mahasiswa dapat menyadari pentingnya menghargai hak-hak orang lain serta mematuhi peraturan yang ada. Mereka bisa menjadi teladan bagi komunitas lain, serta berjuang untuk keadilan sosial yang lebih baik. Peningkatan kesadaran hukum juga berpotensi mengurangi perbuatan kriminal dan meningkatkan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat menjalani kehidupan di lingkungan yang lebih aman dan nyaman.

Mahasiswa bisa menjadi penggerak perubahan yang konstruktif dengan mengadvokasi pemahaman hukum dan kepatuhan terhadap regulasi. Mereka bisa memperjuangkan keadilan sosial serta hak-hak masyarakat yang diabaikan. Dengan menyadari hak dan tanggung jawab mereka, mahasiswa dapat memperjuangkan keadilan sosial serta hak-hak masyarakat yang terpinggirkan. Mereka bisa menjadi teladan bagi komunitas lain, serta memperjuangkan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat.

Pemahaman hukum yang lebih baik juga bisa membantu memperbaiki mutu pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah bisa lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih terbuka dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Mahasiswa dapat berperan sebagai pengawas pemerintah yang handal, serta memperjuangkan kebijakan yang lebih baik demi masyarakat. Dengan mengetahui hak dan tanggung jawab mereka, mahasiswa dapat memperjuangkan keadilan sosial serta hak-hak masyarakat yang terpinggirkan. Oleh karena itu, pemahaman hukum dan kepatuhan terhadap regulasi sangat krusial dalam membangun komunitas yang lebih adil dan setara. Mahasiswa bisa menjadi pendorong perubahan yang baik, serta memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak komunitas yang terabaikan.

3. Pembentukan Karakter Bangsa Yang Bertanggung Jawab

Mahasiswa punya peran penting dalam membentuk karakter bangsa yang bertanggung jawab. Ketika mereka memahami hak dan kewajiban, mereka bisa jadi teladan bagi orang lain dan berjuang untuk keadilan sosial. Mereka bisa jadi agen perubahan yang positif, memperjuangkan hak-hak masyarakat yang sering diabaikan. Proses pembentukan karakter yang baik juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga persatuan. Ini bisa bikin lingkungan jadi lebih harmonis. Mahasiswa bisa menjadi penghubung antar kelompok dan memperjuangkan keadilan sosial, membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran.

Mahasiswa yang bertanggung jawab bisa jadi contoh bagi yang lain, berjuang untuk kebijakan yang lebih baik dan hak-hak masyarakat yang diabaikan. Dengan memahami hak dan kewajiban mereka, mahasiswa bisa menjadi agen perubahan positif yang membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil. Jadi, penting untuk membentuk karakter bangsa yang bertanggung jawab jika kita mau bikin masyarakat yang lebih adil. Mahasiswa bisa berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih damai dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang belum terpenuhi.

4. Pendorong Perubahan Sosial dan Reformasi

Mahasiswa sering jadi penggerak perubahan sosial dan reformasi. Dengan memahami hak-hak yang perlu diperjuangkan dan kewajiban yang harus dilaksanakan, mereka bisa berjuang untuk keadilan sosial dan hak-hak masyarakat yang sering diabaikan. Mereka bisa jadi agen perubahan yang positif dan mendorong kebijakan yang lebih baik untuk warga. Mereka juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan begitu, masyarakat jadi lebih aktif memperjuangkan hak-hak mereka. Mahasiswa bisa berperan sebagai pengawas pemerintah yang baik dan meminta kebijakan yang lebih adil. Ini semua bisa membantu menciptakan masyarakat yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Dengan menekankan keadilan sosial, mahasiswa bisa jadi contoh buat orang lain dan mendukung proses perubahan yang lebih baik. Mereka membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan. Mahasiswa, dengan memahami hak dan kewajiban mereka, punya potensi besar untuk membawa perubahan positif.

5. Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Pemerintahan

Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan demokrasi dan sistem pemerintahan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara. Hasilnya, masyarakat dapat lebih aktif memperjuangkan hak-hak dan keadilan sosial positif dengan memperjuangkan demokrasi dan pemerintahan yang lebih berkualitas. Mereka dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terabaikan serta keadilan sosial. Dengan mengetahui hak dan kewajiban mereka, mahasiswa dapat memperjuangkan hak-hak

masyarakat yang terabaikan dan keadilan sosial . Mereka dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain , dan memperjuangkan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat.Meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan sejahtera.

Mahasiswa dapat menjadi pengawas pemerintah yang efektif, dan memperjuangkan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat. Dengan memahami hak dan kewajiban mereka, mahasiswa dapat memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak masyarakat yang terabaikan.

Oleh karena itu, pembenahan kualitas demokrasi dan pemerintahan sangatlah diperlukan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan lebih setara.Selain itu, meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan juga dapat meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat. Sementara itu, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan sejahtera. Selain itu, mahasiswa dapat menjadi pengawas yang efektif terhadap aksi pemerintah. Mahasiswa dapat berjuang untuk kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga, maka mahasiswa dapat memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak yang diabaikan dari masyarakat. Untuk itu, meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap masyarakat yang lebih adil dan setara.

6. Mendorong Inklusivitas dan Toleransi

Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan demokrasi dan sistem pemerintahan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara. Hasilnya, masyarakat dapat lebih aktif memperjuangkan hak-hak dan keadilan sosial positif dengan memperjuangkan demokrasi dan pemerintahan yang lebih berkualitas . Mereka dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terabaikan serta keadilan sosial .Dengan mengetahui hak dan kewajiban mereka, mahasiswa dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terabaikan dan keadilan sosial . Mereka dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain , dan memperjuangkan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat. Meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan sejahtera.

Mahasiswa dapat menjadi pengawas pemerintah yang efektif, dan memperjuangkan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat. Dengan memahami hak dan kewajiban mereka, mahasiswa dapat memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak masyarakat yang terabaikan.Oleh karena itu , pembenahan kualitas demokrasi dan pemerintahan sangatlah diperlukan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan lebih setara.Selain itu, meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan juga dapat meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat. Sementara itu, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan sejahtera. Selain itu, mahasiswa dapat menjadi pengawas yang efektif terhadap aksi pemerintah. Mahasiswa dapat berjuang untuk kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga, maka mahasiswa dapat memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak yang diabaikan dari masyarakat. Untuk itu, meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap masyarakat yang lebih adil dan setara.

Pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar untuk mempersiapkan warga negara untuk menjadi generasi bangsa yang akan memiliki kemampuan untuk berperan aktif dalam masyarakat. Menurut Kerr, ada tiga jenis pendidikan kewarganegaraan yang dapat diberikan kepada warga negara. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan (pendidikan kewarganegaraan); yang kedua adalah pendidikan melalui kewarganegaraan (pendidikan melalui kewarganegaraan); dan yang ketiga adalah pendidikan kewarganegaraan. Singkatnya, pendidikan kewarganegaraan adalah alat yang memungkinkan warga negara untuk melakukan

kewajiban mereka sebagai warga negara secara aktif dan cerdas. Dan pendidikan politik tidak terbatas pada pelajaran di sekolah; orang luar juga penting untuk pendidikan politik.

Hak berarti berkuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harus kita terima atau dianggap sebagai hal yang selalu kita lakukan, dan orang lain tidak boleh merampasnya dari kita, baik secara paksa maupun tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan hak lainnya. Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan demi mendapatkan hak atau kuasa kita. Ini mungkin karena kita sudah mendapatkan hak. Itu tergantung pada masalahnya. Untuk mendapatkan hak kita sebagai warga negara, kita harus melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai warga negara. Tidak diragukan lagi bahwa hak dan kewajiban ini tidak dapat dibatasi, namun penting untuk memperhatikan betapa luasnya mereka.

Menurut pandangan Notonegoro tentang hak adalah “oleh pihak tertentu. Hak untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harus diterima atau dilaksanakan dan pada prinsipnya tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang mungkin terpaksa melakukannya.” Menurut para ahli, hak dapat didefinisikan sebagai apa yang dibutuhkan seseorang untuk melindungi dirinya sendiri dan menerima atau melakukan sesuatu untuk kepentingannya sendiri. Ini untuk memungkinkan setiap orang menikmati hak-hak mereka dan secara terbuka menyatakan pendapat dan keyakinan mereka sebagai warga negara. Hak kebebasan berekspresi di tempat sangat umum penting bagi warga Indonesia, seperti yang ditunjukkan dalam uraian ini.

Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Tergantung situasinya. Sebagai warga negara kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, namun dalam pemenuhannya harus seimbang. Kalau gak seimbang bisa terjadi pertentangan dan bisa saja menempuh jalur hukum. Menurut Notonegoro, “Kewajiban adalah memberikan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan atau diberikan oleh suatu pihak tertentu, dan pada prinsipnya tidak dapat digantikan oleh pihak lain yang dapat dipaksakan oleh pihak-pihak tersebut untuk menggugat.” Menurut kutipan tersebut, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang diberikan kepadanya sebagai warga negara. Ini adalah aspek penting dari kebebasan berekspresi karena, selain memiliki hak untuk berekspresi, setiap warga negara juga harus memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan pendapat mereka secara wajar untuk menjaga persatuan masyarakat dan menghindari perpecahan. Pernyataan ini digunakan untuk membahas arti dan batasan kebebasan berbicara di depan umum.

Hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pertahanan negara yang salah satunya dapat diwujudkan dalam program bela negara, secara jelas telah diatur dalam konstitusi. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Kemudian Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 kembali menegaskan “tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”. Partisipasi warga negara dalam program bela negara lebih lanjut diatur dalam beberapa UU, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara), Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih (UU Rakyat Terlatih), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (UU Ketentuan Pokok Hankam).

Warganegara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur Negara. Amerika Hikam mengatakan bahwa warga negara adalah anggota komunitas yang membentuk Negara, dan Koerniatmo S. juga mengatakan bahwa warga negara

adalah anggota Negara. Warga negara memiliki status khusus terhadap negara mereka sebagai anggota. Ia memiliki hak dan kewajiban timbal balik terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, istilah "warga negara" (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) mengacu pada warga negara yang diakui secara hukum sebagai warga negara. Selain itu, pasal 1 UU No. 22 Tahun 1958 menyatakan bahwa warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang telah menjadi warga Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan-undangan, perjanjian, atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya, berdasarkan prinsip kewarganegaraan, seseorang adalah warga negara yang memiliki tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Setiap negara memiliki hak untuk menetapkan dasar kewarganegaraan. Ada dua standar untuk menerapkan kewarganegaraan : kelahiran dan perkawinan.

Pentingnya hak dan kewajiban tidak harus dimulai saat orang dewasa sebaliknya, mereka harus belajar hak dan kewajiban sejak usia dini. Siswa mendapat manfaat besar dari penerapan hak konstitusional di sekolah. Hak ini mencakup komunikasi dan pembelajaran di sekolah serta kehidupan sehari-hari anak-anak. Media pendidikan memungkinkan pelaksanaan hak konstitusional warga negara secara langsung di sekolah. Harapannya adalah agar siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan dini hak konstitusional menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme warga negara di masa mendatang. Mengakui hak konstitusional warga negara, setiap warga negara diharapkan memiliki rasa cinta nasional. Oleh karena itu, mungkin perlu untuk menerapkan langkah-langkah untuk membawa hak konstitusional

KESIMPULAN | CONCLUSION

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap hak dan kewajiban warga negara memiliki pengaruh yang berdampak positif seperti dapat meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan terhadap aturan selain itu juga mahasiswa menjadi lebih sadar akan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan meningkatkan keadilan sosial mahasiswa dapat memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak masyarakat yang terabaikan dengan meningkatkan kualitas pemerintahan mahasiswa dapat menjadi pengawas pemerintah yang efektif dan memperjuangkan kebijakan yang lebih baik untuk menciptakan Masyarakat yang lebih adil dan setara mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang positif dan memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, pemahaman mahasiswa terhadap hak dan kewajiban warga negara sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan harmonis.

UCAPAN TERIMAKASIH | THANK-YOU NOTE

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta semangat dalam proses penulisan artikel ini. Terima kasih khusus saya sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah PPKN (Bapak Edy Kurniawansyah S.Pd.,M.Pd) atas bantuan dan kerjasamanya. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif bagi pembaca sekalian.

REFERENSI | REFERENCE

Haifarashin, Ridha, Yayang Furi Furnamasari, And Dinie Anggraeni Dewi. "Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban Dan Hak Warga Negara." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.3 (2021): 7261-7265. <https://www.academia.edu/download/115534455/483330126.pdf>
Zulkarnain, Ali Iskandar, Et Al. "Dampak Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pemahaman Hak Dan

- Kewajiban Warga Negara Bagi Siswa." *Journal Of Innovative And Creativity* 5.2 (2025): 350-362. <https://Www.Joecy.Org/Index.Php/Joecy/Article/View/173>
- Anastasiya, Dinda. "Peningkatan Pemahaman Siswa Sd Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara Melalui Pembelajaran Aktif." *Jurnal Cahaya Madrasah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 1.1 (2025). <https://Ejournal.Stitaw-Binjai.Ac.Id/Index.Php/Cahaya/Article/Download/4/1>
- Nugraha, Arya Ramdhan, Dea Salsabila, And Delya Noer Handayani. "Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban Dan Hak Warga Negara." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 11.2 (2023): 146-150. <https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jjpp/Article/View/64662>
- Bangsa, Pilar Penguatan Karakter. "Pemahaman Hak Dan Kewajiban Warga Negara Sebagai." <https://Sihojournal.Com/Index.Php/Pakehum/Article/View/340>
- Sumardi, L., Mustari, M., Herianto, E., Fauzan, A., & Kurniawansyah, E. (2023). *Ethnocivic: Eksplorasi Potensi Kearifan Lokal Sasak Sebagai Sumber Belajar Ppkn Sekolah Menengah Atas Kelas Xii*. *Journal Of Classroom Action Research*, 5(2), 237-242. <https://Jppipa.Unram.Ac.Id/Index.Php/Jcar/Article/View/2289>
- Haifarashin, Ridha, Yayang Furi Furnamasari, And Dinie Anggraeni Dewi. "Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban Dan Hak Warga Negara." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.3 (2021): 7261-7265.
- Arliman, L. 2020. "Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0." *Ensiklopedia Sosial Review* 2(3): 333–39.
- Khufi, I. A., Jamil, N. A., Astiza, S. R., Kalsum, S. N. U., Idayanti, W., Kurniawan, W., & Suryadi, W. (2020). Mimplementasi Hak Peserta Didik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Di Sdn Batuan Ik. Alpen: *Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(2), 65-71.
- Farahdiba, Siti Zikrina, Et Al. "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Uud 1945." *Jurnal Kewarganegaraan* 5.2 (2021): 837-845.
- Fitria. 2013. "Kewarganegaraan Dan Warga Negara." *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53(9): 1689–99.
- Haifarashin, Ridha, Yayang Furi Furnamasari, And Dinie Anggraeni Dewi. "Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban Dan Hak Warga Negara." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.3 (2021): 7261-7265.